

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Februari 2020

Penulis

Sriyono,A.Ptnh

ABSTRAK

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan PTSL adalah ketersediaan peraturan-perundang-undangan yang melindungi proses dan produk PTSL. Di antaranya dalam masalah lamanya waktu pengumuman serta proses pemeriksaan data yuridis yang tidak melalui proses adjudikasi (sidang pemeriksaan

tanah di lapangan). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai terobosan kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah atas kepemilikan tanahnya namun perlu dikaji kembali bentuk perlindungan hukum bagi para peserta PTSL sebagai bentuk terwujudnya kepastian hukum dalam mendapatkan legalitas atas tanah yang notabene tanah sebagai objek yang rawan akan sengketa dan konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Blora, (2) bentuk perlindungan hukum bagi peserta program PTSL di Kabupaten Blora, (3) hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Blora. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dianalisis dengan teori Negara hukum kesejahteraan dan teori perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1) Pelaksanaan PTSL melalui tahapan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN tentang PTSL meliputi penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah, pembukuan, penerbitan dan penyerahan sertifikat, (2) Perlindungan hukum apabila ada kesalahan data baik data fisik maupun data yuridis pada saat pengumuman data di desa/kelurahan dapat diperbaiki kembali sebelum dibuatkan sertipikat, tetapi apabila sertipikat telah terbit tetapi didalamnya ada kesalahan data, maka data yang salah dapat diajukan keberatan ke Kantor Pertanahan dan dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi, (3) Hambatan dalam pelaksanaan program PTSL yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Blora sebagai pelaksana program PTSL meliputi tingkat pendidikan masyarakat, pemohon PTSL sukar untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran, tanda batas tidak terpasang, Kelengkapan syarat administrasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peserta Permohonan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

ABSTRACT

One of the important things that must be considered in the administration of a Complete Systematic Land Registry is the availability of laws that protect the process and product of a Systematic Complete Land Registration. Among them is the issue of the length of time of the announcement as well as the process of checking juridical data

that did not go through the adjudication process (land inspection hearing in the field). Complete Systematic Land Registration as a breakthrough in government policy to facilitate the community to obtain land certificates for their land ownership but needs to be reviewed in the form of legal protection for PTSL participants as a form of establishing legal certainty in obtaining legality on land which incidentally is a land that is prone to disputes and conflicts.

This study aims to determine, study and analyze: (1) the implementation of a complete systematic land registration program (PTSL) in Blora Regency, (2) form of legal protection for PTSL program participants in Blora Regency, (3) obstacles and solutions in implementing the PTSL program in Blora Regency. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Then secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The study was analyzed with the theory of welfare state law and legal protection theory

Based on the results of the study it was concluded: (1) Complete Systematic Land Registration through stages based on the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of BPN regarding PTSL including location determination, preparation, establishment and establishment of adjudication committee, counseling, collection and processing of physical and juridical data, land inspection, announcement, publishing the decision to grant land rights, bookkeeping, issuing and handing over certificates, (2) Legal protection if there are data errors both physical data and juridical data at the time of data announcement in the village / kelurahan corrected again before the certificate is made, but if the certificate has been issued but inside there is a data error, then the wrong data can be submitted to the Land Office and can be resolved through litigation or non-litigation, namely through mediation or through the State Administrative Court, (3) Obstacles in the implementation of the program PTSL ram faced by the Blora Regency Land Office as the implementer of the PTSL program includes the level of public education, PTSL applicants are difficult to present when measuring activities, boundary markers are not installed, completeness of administrative requirements.

Keywords: Legal Protection, Application Participants, Systematic Land Registration Complete

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv